

ANALISIS PERSEPSI TERHADAP EKOLOGI DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

(Analysis of Perception towards Ecology in Ecotourism Development in Sleman Regency)

EVARENY YUSTINA¹⁾, RICKY AVENZORA²⁾ DAN TUTUT SUNARMINTO³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, Pascasarjana IPB

^{2,3)} Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB

Email: evareny@yahoo.com

Diterima 01 November 2017 / Disetujui 22 Januari 2018

ABSTRACT

The study on the ecology perception is important to support ecotourism development in Sleman Regency. The objectives of this study are to create an effective strategy among stakeholders that ensures the sustainability of ecology in ecotourism development in Sleman. This study was conducted in Sleman Regency involving groups of respondent who are stakeholders of ecotourism in Sleman Regency. Data was collected using a closed-ended questionnaire with a scale of 1-7. The result shows that the stakeholder's perception in Sleman Regency is varied and an effective strategy is necessary for the development of a sustainable ecotourism.

Keywords: ecology, ecotourism, perception, Sleman, sustainable

ABSTRAK

Studi persepsi terhadap ekologi merupakan hal yang penting untuk mendukung pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan strategi yang efektif di antara para pemangku kepentingan, yang mendukung kelestarian ekologi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman. Kelompok responden yang dilibatkan merupakan para pemangku kepentingan ekowisata di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup (*closed ended kuesioner*) dengan skala 1-7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi para pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman beragam sehingga diperlukan strategi yang efektif guna mendorong keberpihakan pemangku kepentingan terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman.

Kata kunci: berkelanjutan, ekologi, ekowisata, persepsi, Sleman

PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia, wisata telah menunjukkan perannya dalam mendukung perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Di India, wisata menyumbang 6,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014, serta mendorong pertumbuhan lapangan kerja dibandingkan dengan sektor lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ohlan (2017). Sedangkan di Turkey, wisata membantu mengurangi hambatan nilai tukar mata uang dan mendukung efisiensi biaya untuk pengembangan industri (Kucukaltan dan Terziouglu 2013).

Meskipun kegiatan wisata memberikan manfaat ekonomi yang signifikan terhadap pembangunan, namun wisata juga berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap kondisi ekologi. Hal ini didasarkan pada kegiatan wisata yang umumnya dikelola secara masif tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi. Mengacu pada hasil penelitian Dipayana dan Sunarta (2015), kegiatan wisata memicu pertumbuhan sarana (*villa dan guesthouse*) serta meningkatnya konversi lahan dari

pertanian ke non pertanian di Desa Tibubeneng Kabupaten Badung Bali, dimana luasan lahan 302,30 hektar di tahun 2011 turun menjadi 260 hektar di tahun 2013. Lebih lanjut, Holden (2008) menambahkan bahwa pengembangan wisata yang tidak berkelanjutan, berpotensi mendorong penggunaan sumber daya alam yang mengarah pada transformasi habitat secara ekologis serta punahnya flora dan fauna.

Memperhatikan berbagai paparan para ahli di atas, maka dipandang penting untuk mengembangkan kegiatan wisata yang berkelanjutan dalam kerangka ekowisata. Ekowisata dipahami dengan merealisasikan empat aspek penting, di antaranya adalah; (1) dikemas dalam jumlah terbatas, (2) memperhatikan nilai – nilai ekologi, (3) pengawasan berkelanjutan, (4) mengandung unsur edukasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh David (2011). Selanjutnya, hal ini dapat diwujudkan dengan mengelola keterlibatan para pemangku kepentingan, sehingga mendorong upaya para pihak untuk melestarikan ekologi, dimana hal ini dimaksudkan untuk (1) mereduksi terjadinya eksploitasi masif terhadap lingkungan, (2)

mendorong partisipasi para pihak untuk mengelola isu ekologi dalam pengembangan ekowisata, (3) mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan yang berpotensi mengancam kelestarian ekologi. Peric *et al.* (2014), menegaskan bahwa pengelolaan pemangku kepentingan merupakan proses pengintegrasian hubungan dan kepentingan para pihak guna mendukung keberlanjutan ekowisata dalam jangka panjang. Selanjutnya, Yilmaz dan Gunel (2009) menambahkan pengelolaan pemangku kepentingan dipandang sebagai media yang berguna untuk mengakomodasi kepentingan para pihak dalam mencapai tujuan.

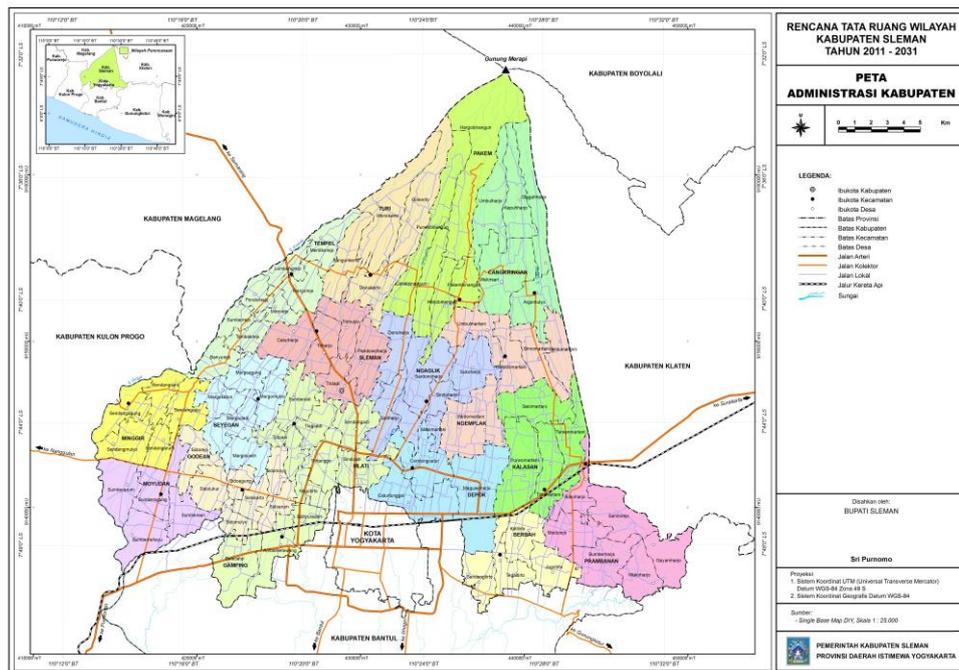
Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang penting dilakukan studi persepsi terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata. Hal ini didasarkan pada berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman, di antaranya; Candi Prambanan, Ratu Boko, Sambisari, Ijo, Museum Ullen Sentalu, Gunung Merapi, desa wisata, atraksi seni dan kuliner tradisional. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman (2015) menyebutkan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor ini sebesar Rp 104M atau meningkat dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 92M. Meskipun berbagai potensi ekowisata berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman, namun tidak dipungkiri bahwa kawasan Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Sleman menimbulkan kerentanan terhadap timbulnya bencana ekologi. Selain itu, Kabupaten Sleman juga merupakan daerah hulu yang berfungsi sebagai wilayah tangkapan air bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dasar itu, maka dipandang penting untuk melakukan studi persepsi terhadap ekologi yang bertujuan untuk menghasilkan strategi yang efektif guna menjembatani kepentingan para pihak dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman. Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan ekowisata di Kabupaten Sleman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman pada bulan Mei – Agustus 2016 (Gambar 1). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan mempertimbangkan sampel yang terdiri dari orang – orang yang dianggap memiliki kesesuaian pengetahuan dan pengalaman terkait dengan kajian, sebagaimana diungkapkan oleh Altinay dan Paraskevas (2008).

Adapun alasan penggunaan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih dengan metode ini dianggap logis dan lebih representatif mewakili populasi, yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dalam menentukan responden. Pertimbangan menentukan responden, di antaranya adalah; (1) kategori Pemerintah, yang berasal dari Institusi Pemerintah yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata di Kabupaten Sleman, (2) kategori masyarakat pelaku ekowisata, yaitu penduduk Kabupaten Sleman yang memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan produk dan jasa ekowisata (pemandu, pengelola desa ekowisata, pengrajin), (3) kategori masyarakat bukan pelaku ekowisata, yang merupakan penduduk yang tinggal di Kabupaten Sleman dan memahami perkembangan ekowisata di Kabupaten Sleman tetapi tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyediaan barang dan jasa ekowisata, (4) kategori pelaku bisnis, yang merupakan pemilik atau pengelola badan usaha baik perusahaan kecil, menengah hingga besar, yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, yaitu; bisnis hotel, bisnis rumah makan, bisnis travel, (5) kategori wisatawan, yaitu pengunjung yang telah lebih dari dua kali mengunjungi Kabupaten Sleman untuk melakukan kegiatan ekowisata.

Roscoe (1975) memaparkan apabila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah sampel yang diambil minimal 30 responden untuk mewakili masing – masing kategori, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 160 responden, yang terdiri dari; (1) masyarakat bukan pelaku ekowisata (30 orang), (2) masyarakat pelaku ekowisata (30 orang), (3) pelaku bisnis (30 orang), (4) wisatawan (30 orang), (5) Pemerintah (40 orang). Khusus untuk kategori masyarakat, sampel terdiri dari dua, yaitu (1) masyarakat bukan pelaku ekowisata, yang tinggal di Kabupaten Sleman dan memahami perkembangan ekowisata di Kabupaten Sleman tetapi tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyediaan barang dan jasa ekowisata, (2) masyarakat pelaku ekowisata yang tinggal di Kabupaten Sleman dan memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan produk dan jasa ekowisata (pemandu, pengelola desa ekowisata, pengrajin). Sedangkan untuk kategori Pemerintah, ada 40 responden yang berasal dari Institusi Pemerintah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekowisata di Kabupaten Sleman yang terdiri dari: BAPPEDA, Pemerintah Kabupaten Sleman, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Phenomenology merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dimana hal ini untuk mengkaji fenomena manusia dan perilaku sosialnya. Peneliti berusaha untuk mendalami dan mengetahui, makna yang terkandung di balik fenomena yang bersumber dari partisipan (Altinay dan Paraskevas 2008).

Fenomena yang dipelajari merupakan persepsi para pemangku kepentingan terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman. Persepsi diukur menggunakan metode *One Score-One Indicator Scoring System* dengan skala yang digunakan yaitu 1-7 (pengembangan dari skala Likert 1-5), dimana penggunaan skala 1-7 sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengartikulasikan nilai dengan sangat detail (Avenzora 2008).

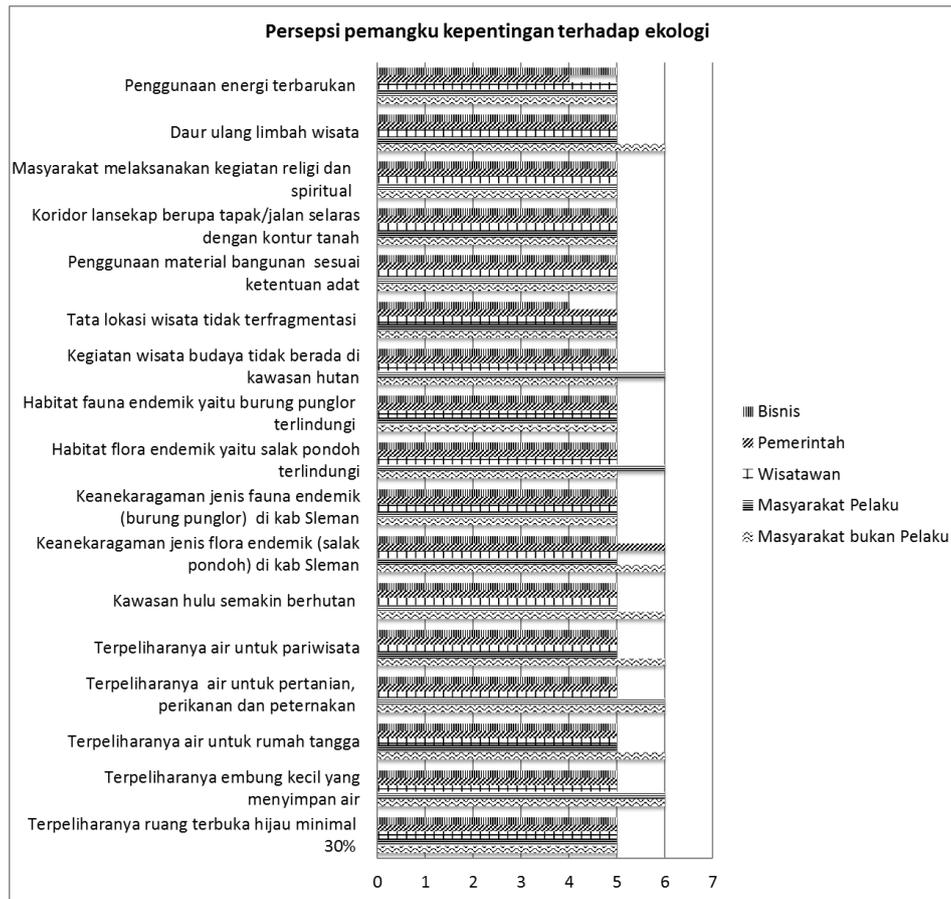
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dua jenis data yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner tertutup (*close ended kuesioner*) dan data sekunder yang terdiri dari 1) dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, 2) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, 3) data BPS Kabupaten Sleman tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi terhadap Ekologi

Ekologi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai sejauhmana keberpihakan para pemangku kepentingan terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata. Keberpihakan itu dapat dinilai dengan menelusuri apakah pengembangan ekowisata yang dilakukan para pemangku kepentingan telah mendukung dan menjamin keberlanjutan ekologi, yaitu dalam hal: (1) ruang terbuka hijau, (2) keanekaragaman hayati (flora dan fauna), (3) ketersediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, perikanan, peternakan, pertanian dan rumah tangga, (4) penetapan lokasi wisata dan penggunaan material bangunan yang sesuai dengan kondisi lokal, (5) koridor lansekap, (6) pengelolaan sampah, (7) penerapan energi terbarukan dalam kegiatan wisata, yang dikembangkan dari indikator - indikator yang dipaparkan oleh Buckley (2003)

Dari penelusuran tujuh hal tersebut, maka hasil studi menunjukkan bahwa nilai rata – rata persepsi para pemangku kepentingan terhadap ekologi adalah skor 5 (agak baik) untuk Pemerintah, masyarakat, wisatawan, dan skor 4 (ragu – ragu) untuk pelaku bisnis, yang secara detail tampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Persepsi para pemangku kepentingan terhadap ekologi

Berdasarkan hasil kajian tampak bahwa Pemerintah, masyarakat dan wisatawan berpandangan bahwa pentingnya memperhatikan kelestarian ekologi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan pelaku bisnis. Beragamnya perbedaan persepsi ini diperkuat fakta – fakta di lapangan. Dalam konteks ketersediaan sumber daya air, seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran untuk turut memelihara sumber daya air, yang diwujudkan dalam gerakan bersih embung dan bersih sungai. Terkait embung, Kabupaten Sleman memiliki 7 embung, di antaranya adalah Embung Tambakloyo, Kaliaji, Lampeyan, Tirtoagung, Tlogoputri, Gedongan dan Tegaltirto. Embung – embung ini dimanfaatkan sebagai sumber resapan air serta mendukung irigasi sawah. Selain itu, masyarakat juga melaksanakan kegiatan bersih sungai yang dikenal dengan Merti Kali. Merti Kali merupakan upacara adat lokal yang mengandung makna yaitu menghormati sungai sebagai

sumber penghidupan. Terpeliharanya kondisi embung dan sungai di Kabupaten Sleman, bukan hanya mendukung kebutuhan air di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, juga menciptakan daya tarik bagi wisatawan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti memancing dan atraksi seni budaya.

Sebaliknya, konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman terjadi setiap tahunnya, sebagaimana yang tampak dalam Tabel 1. Meskipun alih fungsi lahan tidak terkontrol, namun masyarakat masih memiliki inisiatif untuk menyisakan lahan tempat tinggalnya sebagai kebun pekarangan rumah. Lahan ini ditanami berbagai jenis tanaman sayuran serta tanaman obat - obatan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Di samping itu, komunitas petani di Kabupaten Sleman turut berpartisipasi dengan mengembangkan budidaya mina padi organik yang dimanfaatkan untuk kegiatan *agro-tourism*.

Tabel 1. Luas lahan sawah Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	2009	2010	2011	2012
1	22.803	22.708	22.675	19.330,59

Sumber: Cakrabawa *et al.* (2014)

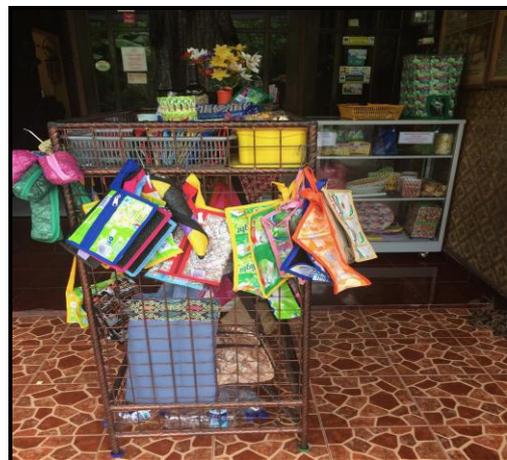
Ditinjau dari kawasan hutan, ekosistem hutan di Kabupaten Sleman pernah mengalami degradasi. Gunawan *et al.* (2015) mengungkapkan bahwa erupsi merapi tahun 2010 menyebabkan 77% ekosistem hutan mengalami degradasi, yaitu; 12,5% atau $\pm 766,67$ ha (degradasi berat), 2.207,61 ha atau 36% (degradasi sedang), 1.745,54 ha atau 28% (degradasi ringan) dan 23% atau $\pm 1.425,22$ ha tidak terkena dampak erupsi. Terdegradasinya ekosistem hutan paska erupsi Merapi telah mendorong Pemerintah untuk merestorasi kawasan hutan lindung. Meskipun kegiatan restorasi telah diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, namun belum seluruh pihak yang berinisiatif berpartisipasi dalam kegiatan ini terutama para pelaku bisnis.

Dalam konteks keanekaragaman hayati flora, salak pondoh (*Salacca zalacca gaertner voss*) yang merupakan flora identitas Kabupaten Sleman banyak dikembangkan

untuk diolah menjadi berbagai jenis bahan pangan, minuman dan bahan obat - obatan. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan dukungan dengan menetapkan Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel sebagai wilayah pengembangan sentra industri kreatif salak pondoh, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2015 - 2025. Di samping flora identitas (salak pondoh), Kabupaten Sleman juga memiliki fauna identitas yaitu burung Punglor (*Zoothera citrina*). Meskipun burung Punglor ditetapkan sebagai fauna identitas Kabupaten Sleman, namun burung Punglor tidak banyak dikenali masyarakat. Menurut data IUCN Redlist, terungkap bahwa burung Punglor (*Zoothera citrina*) termasuk dalam status *least concern* (berisiko rendah).



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 3. Kondisi lingkungan di Kabupaten Sleman (a) Burung Punglor (b) Usaha daur ulang sampah (c) Kebun pekarangan rumah milik masyarakat (d) Aliran sungai

Ditinjau dari pengelolaan daur ulang limbah wisata, upaya para pihak untuk melakukan daur ulang limbah wisata masih cukup minim. Pelaku bisnis masih memiliki ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA)

yang dikelola oleh Pemerintah. Upaya pengelolaan daur ulang limbah yang dilakukan masyarakat hanya ditunjukkan salah satu desa wisata yaitu desa wisata kelola sampah Sukunan yang khusus mengelola sampah

sebagai bagian dari kegiatan atraksi wisatanya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan aturan serta kewajiban untuk daur ulang sampah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Hanya saja, hal ini belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat maupun pelaku bisnis.

Dilihat dari indikator penerapan penggunaan energi terbarukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan masih menggunakan energi listrik konvensional. Meskipun pemanfaatan energi terbarukan (biogas) diterapkan oleh sebagian kecil masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian skala rumah tangga, namun inisiatif ini belum diikuti oleh pelaku bisnis.

Memperhatikan berbagai fakta di lapangan yang tampak di atas, setidaknya ada dua hal yang mendasari perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan terhadap ekologi, yaitu pengetahuan dan orientasi. Pengetahuan mendesain pola pikir individu dalam mengamati perubahan lingkungan dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Keraf dan Dua (2001) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang menentukan cara pandang terhadap realita. Sedangkan orientasi mengarah pada nilai yang dipegang untuk melakukan tindakan. Ditambahkan oleh Stern (2000) terdapat tiga orientasi nilai yang mempengaruhi perilaku terhadap lingkungan, antara lain (1) nilai *egoistic* (nilai yang terfokus pada diri sendiri), (2) nilai *altruistic* (nilai yang memperhatikan kesejahteraan orang lain), (3) nilai *biospheric* (nilai yang menekankan pada lingkungan dan biospher).

Beragamnya persepsi terhadap ekologi menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda, dimana hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Pelaku bisnis tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai lingkungan sehingga pelaku bisnis tidak terlalu memperhatikan isu – isu terkait ekologi. Di samping itu, orientasi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha yaitu memperbesar profit. Annuar *et al.* (2012) menyebutkan pelaku bisnis lebih berorientasi pada keuntungan selain mengelola ruang, aktivitas dan produk ekowisata. Sementara itu, pemahaman dan inisiatif untuk menjaga kondisi ekologi justru dimiliki lebih baik oleh masyarakat. Masyarakat memandang ekowisata bukan saja berdampak bagi ekonomi dan sosial budaya, melainkan juga berperan dalam mendukung keberlanjutan ekologi sehingga tampak kuatnya keberpihakan masyarakat terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata. Sejalan dengan hal ini, Muganda *et al.* (2013) menyebutkan masyarakat lokal tidak dapat diabaikan keberadaannya karena perannya yang krusial dalam pengembangan ekowisata. Ditinjau dari sisi wisatawan, persepsi positif yang dimiliki wisatawan menunjukkan bahwa wisatawan memiliki kepedulian dan kesadaran yang tinggi terhadap ekologi.

Sedangkan dari sisi Pemerintah, persepsi Pemerintah terhadap ekologi agak baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk – produk kebijakan yang pro terhadap pengelolaan lingkungan. Di samping itu, adanya dukungan teknis bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan dan sarana pendukung. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan Pemerintah terhadap pelaku bisnis agar terlibat dalam kegiatan pelestarian ekologi dirasakan kurang maksimal sehingga pelaku bisnis tidak menempatkan hal ini sebagai kewajiban yang perlu ditindaklanjuti.

SIMPULAN

1. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap ekologi di antara para pemangku kepentingan. Persepsi Pemerintah, masyarakat pelaku, masyarakat bukan pelaku, wisatawan cenderung lebih baik dibandingkan persepsi pelaku bisnis. Adapun dua hal yang mendasari berbedanya persepsi di antara para pemangku kepentingan yaitu pengetahuan dan orientasi.
2. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami dan mengelola isu – isu yang terkait dengan ekologi. Para pemangku kepentingan perlu membangun hubungan antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama mengenai isu ekologi di Kabupaten Sleman. Setidaknya terdapat dua isu penting terkait ekologi yang perlu ditindaklanjuti bersama yaitu penerapan daur ulang limbah dan penerapan energi terbarukan.
3. Adapun strategi yang efektif yang dapat dilakukan untuk menjembatani kepentingan para pihak dalam pengembangan ekowisata yaitu dalam bentuk kolaborasi. Kolaborasi yang dibangun perlu memuat pandangan bersama dengan memperhatikan prinsip – prinsip keberlanjutan. Pemerintah perlu lebih proaktif untuk memfasilitasi kolaborasi para pihak dengan mengarusutamakan keberpihakan terhadap ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Altinay L, Paraskevas A. 2008. *Planning Research in Hospitality and Tourism*. Burlington (US): Butterworth-Heinemann.
- Annuar NA, Ahmad H, Jusoh H, Hussain MY. 2012. Understanding the role of stakeholder in the formation of tourist friendly destination concept. *Journal of Management and Sustainability*. 2(2): 69-74
- Avenzora R. 2008. *Ekoturisme Teori dan Praktek*. Ricky Avenzora. editor. Banda Aceh (ID): BRR NAD NIAS.
- Buckley R. 2003. Ecological indicators of tourism impacts in parks. *Journal of Ecotourism*. 2(1): 54-66

- Cakrabawa ND, Hakim ML, Supriyatna MA. 2014. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013 Statistics of Agricultural Land 2009-2013*. Jakarta (ID): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian
- David L. 2011. Tourism Ecology: towards the responsible, sustainable tourism future. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. 3(3): 210-216
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. 2015. *Statistik Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sleman*. Yogyakarta (ID): Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
- Dipayana A, Sunarta IN. 2015. Dampak pariwisata terhadap alih fungsi lahan di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (studi sosial budaya). *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 3(2): 58-66
- Holden A. 2008. *Environment and Tourism*. New York (US): Routledge
- Gunawan H, Heriyanto NM, Subiandono E, Mas'ud AF, Krisnawati H. 2015. Invasi jenis eksotis pada areal terdegradasi pasca erupsi di Taman Nasional Gunung Merapi. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversiti Indonesia*. Vol 1(5): 1027-1033
- Keraf S, Dua M. 2001. *Ilmu Pengetahuan : Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta (ID): Penerbit Kanisius
- Kucukaltan D, Terziouglu M.K. 2013. Economic impact of tourism demand: evidence from Turkey. *An International Journal of Tourism and Hospitality Research*. 24(3): 484-488
- Muganda M, Sirima A, Ezra P.M. 2013. The role of local communities in tourism development: grassroots perspectives from Tanzania. *Journal of Human Ecology*. 41(3): 53-66
- Ohlan R. 2017. The relationship between tourism, financial development and economic growth in India. *Future Business Journal*. 3: 9-22
- Peric M, Durkin J, Lamot I. 2014. Importance of stakeholder management in tourism project: case study of The Istra Inspirit Project. *Congress Proceedings Trends in Tourism and Hospitality Industry*.
- Roscoe JT. 1975. *Fundamental Research Statistics for the Behavioural Sciences*. New York (US): Holt Rinehart & Winston
- Stern P. 2000. Toward a coherent theory of environmentally significant behaviour. *Journal of Social Studies*. 56(3): 407-424
- Yilmaz BS, Gunel OD. 2009. The Importance of strategic stakeholder management in tourism sector: research on probable applications. *An International Multidisciplinary journal of tourism*. 4(1): 97-108.